

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sjahrir pada masa penjajahan Belanda dan pada masa pendudukan Jepang adalah perjuangan dalam menghadapi pemerintah Belanda (kolonialisme dan imperialisme) dan perjuangannya dalam menghadapi pemerintah Jepang (fasisme) dengan jalan non-kooperasi. Perjuangannya melawan kolonial diawali dengan mengembangkan sikap kemandirian di kalangan massa, menerapkan politik non-kooperasi yang telah direalisasikannya dalam PNI-Baru. Sjahrir bersama PNI-Baru melakukan berbagai aksi atau propaganda politik, antara lain membicarakan riwayat Belanda, kedudukan tanah jajahan dengan segala penderitaan rakyatnya, serta kemungkinan-kemungkinan mengakhiri masa penjajahan. Aksi yang dilaksanakan pihak Belanda. Sehingga diadakan penangkapan kepada para tokoh PNI-Baru tersebut dan dibuang ke Digul dan Banda Neira. Sedangkan perjuangannya melawan pendudukan Jepang terdapat dua strategi perjuangan. Pertama, secara legal, dimana Sukarno – Hatta bersama tokoh yang lebih tua bergerak dan berjuang secara kooperasi. Kedua, secara illegl, dimana Sjahrir tidak menghendaki kerjasama dengan pemerintah Jepang. Selain itu Sjahrir juga memakai strategi yang bersifat saling melengkapi bersama Hatta dalam melaksanakannya. Langkah yang dilakukan Hatta ialah berusaha mengurangi kekerasan terhadap Jepang dan memanipulasi kegiatan

untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sedangkan langkah Sjahrir ialah ia akan tetap menjauhkan diri dan membentuk suatu kekuatan jaringan bawah tanah, yang didukung terutama oleh para mantan anggota PNI-Baru. Perjuangan gerakan bawah tanah yang sifatnya non kooperasi, dalam perkembangan selanjutnya merupakan suatu kekuatan pendukung lahirnya proklamasi kemerdekaan.

2. Dalam pelaksanaan perwujudan demokrasi di Indonesia, ia menerapkan sistem multi partai sewaktu menjabat sebagai Perdana Menteri pertama dan kemudian diteruskan dengan sistem pemerintahan parlementer, yang membuat Presiden Soekarno hanya bertindak sebagai Presiden Kepala Negara saja dan dirinya yang menjalankan pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Demokrasi sebagai sistem politik yang diusulkannya harus juga dilakukan pendidikan politik untuk mempersiapkannya. Dia menaruh perhatian yang sangat besar pada masalah pendidikan terhadap rakyat, untuk menjalankan demokrasi rakyat haruslah diberi pendidikan politik yang cukup, dikarenakan mayoritas rakyat Indonesia yang masih bersifat feodalisme, agar ketidaktahuan rakyat tidak yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa pemimpin yang berfikir feodal. Ia benci Imperialisme dan Kapitalisme, tetapi ia tidak menolak Liberalisme dalam konteks untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu rakyat dari tirani negara. Dalam kontes kekinian buah dari pemikiran Sjahrir itu masih juga belum terwujud. Masalah sosial seperti pendidikan yang tidak merata, kemiskinan, dan sempitnya lapangan pekerjaan merupakan PR besar yang sampai saat ini

masih belum bisa terselesaikan di negara kita ini. Rakyat yang selayaknya menjadi aktor utama dalam sistem demokrasi hanya terlihat di saat momentum-momentum tertentu saja. Hal ini yang jauh dari apa yang di cita-citakan Sjahrir dengan pemahaman kerakyatannya.